

Apa Pentingnya Etika?

1. Etika menentukan peradaban suatu bangsa
2. Bersifat universal
3. Menentukan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya (SDA & SDM)
4. Menentukan “manfaat” demokrasi
5. Menjadi dasar bagi reformasi birokrasi

Filipina & Jepang

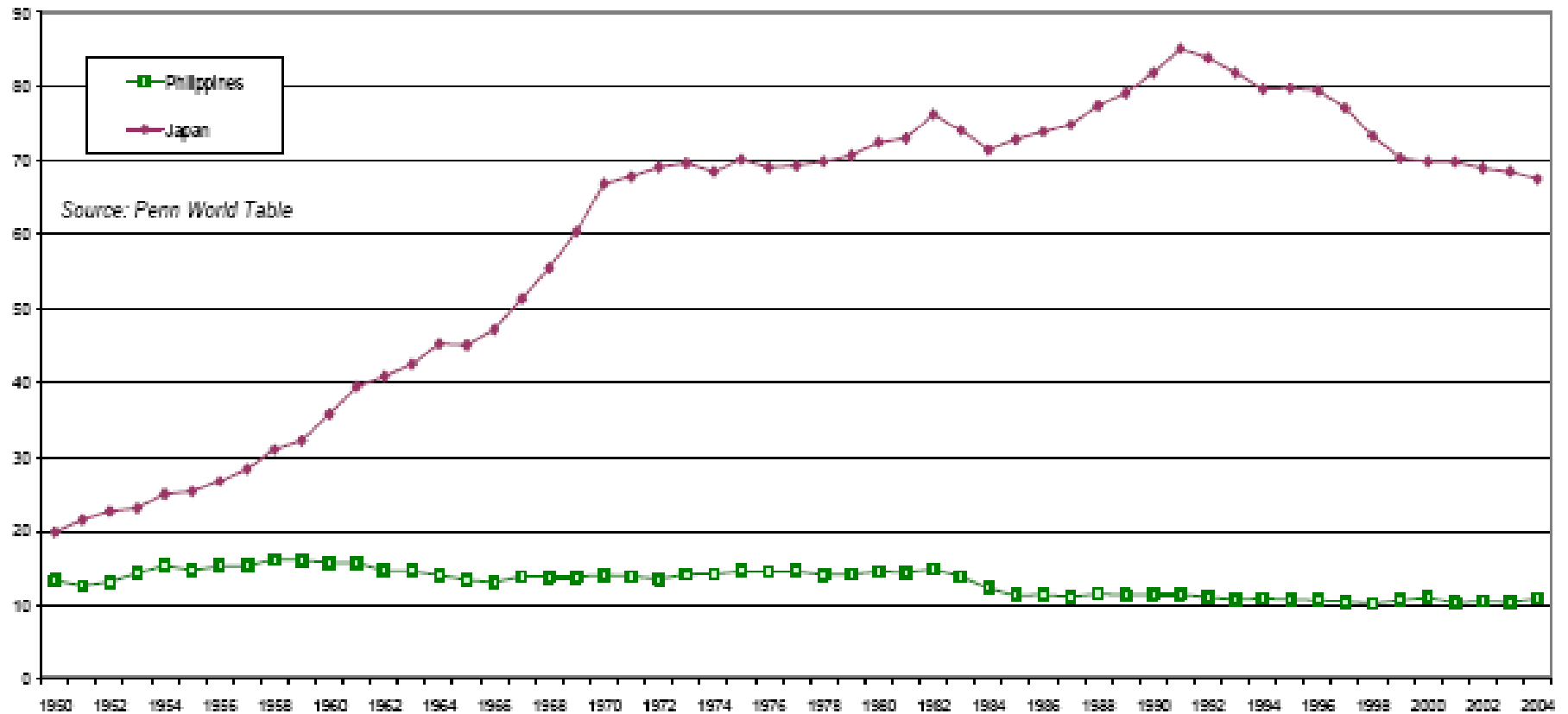


Figure 2B -- Japan & Philippines
Real Per Capita GDP Relative to US (US=100)

Filipina & Cina

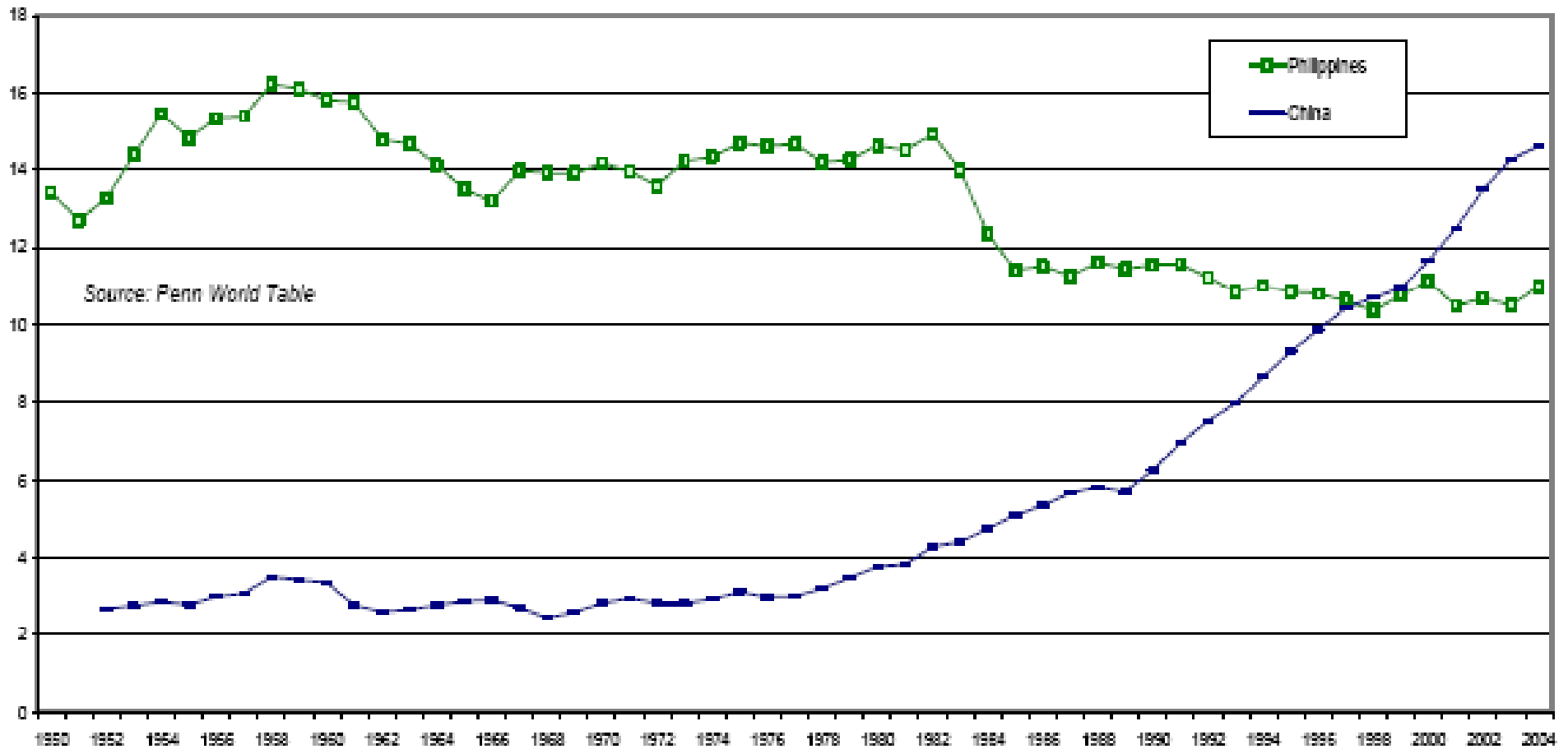


Figure 8B -- China & Philippines
Real Per Capita GDP Relative to US (US=100)

Tujuan RUU EPN (Menurut Pokok Penjelasan Menpan)

1. Memberi landasan bagi ketentuan “payung” dlm membangun integritas
2. Mewujudkan penyelenggara negara yg baik, etis, amanah, berakhlak mulia; mencegah niat dan praktik perbuatan yg menyimpang (nilai, norma, aturan) dlm penyelenggaraan tugas kenegaraan.
3. Sesuai Konvensi PBB ttg Anti-korupsi (2003): agar setiap negara membuat “Code of Conduct for Public Officials”.

Catatan:

- Tidak ada naskah akademik utk RUU ini.
- Mengingat kodifikasi hukum ttg penyelenggaraan negara sudah lengkap (UU 20/2001 ttg Pemberantasan Korupsi, UU 30/2002 ttg KPK, UU No.9/2004 ttg PTUN, dsb) dan setiap bidang profesi sudah punya materi kode etik, apakah “payung hukum” benar-benar diperlukan? Apa tujuan yg sesungguhnya?

Fungsi RUU EPN (ps.3)

1. Sarana pembelajaran
2. Pengembangan etos kerja
3. Instrumen hukum & acuan dlm pembentukan kode etik.

Catatan:

- Sebagai pengembangan etos kerja, draf RUU (12 Bab, 36 pasal, Penjelasan) tidak cukup rinci dan menggugah motivasi
- Sebagai instrumen kode etik, lingkup “penyelenggara negara” yang hendak diatur sangat luas (ps.1: eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif & lembaga kenegaraan lainnya termasuk BUMN).

Prinsip Etika (ps.5)

1. Kejujuran
2. Tepat janji
3. Transparansi
4. Taat aturan
5. Keadilan
6. Kewajaran dan Kepatutan
7. Tanggungjawab
8. Kehati-hatian.

Catatan: penjelasan dari prinsip-prinsip ini (ps.6-13) lebih bermakna sebagai dasar kode etik.

Kode Etik Penyelenggara Negara (ps. 15)

1. Kode etik lembaga:
2. Kode etik pejabat:

Penjelasan: kode etik lembaga dibentuk dan dilaksanakan di setiap lembaga. Kode etik jabatan dapat dibentuk pd lembaga yg lingkup tugasnya terdapat profesi tertentu; Mis: kode etik pegawai pajak (“fiskus”?), kode etik peg bea-cukai, kode etik jaksa.

Catatan: apakah keduanya merupakan rujukan kode etik? Mana yg lebih utama?

Penegakan Kode Etik

- Dasar filosofis pemberian sanksi adalah menyentuh moral, hati-nurani (Penjelasan, alinea 11), tetapi mengapa penegakannya didasarkan pada pengaduan, administratif, dan bahkan pidana? (ps.31)
- Penegakan didasarkan atas laporan pengaduan (ps.26 ayat 2) tetapi terdapat juga ketentuan pidana (ps.31)?

Penyusunan Kode Etik

- Lembaga yg belum punya kode etik harus membuatnya paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU ini (ps.35, Ketentuan Peralihan)
- **Catatan:** hampir semua lembaga dan asosiasi sudah punya materi dasar kode etik (Mis: Sapta Prasetya Korpri, Sapta Marga Prajurit, dsb. Yg sesungguhnya diperlukan adalah menyempurnakan, membuat rinci sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan, menyesuaikan dengan konstelasi politik yg demokratis, dan menjawab kebutuhan masyarakat).